

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAY. JEN. SUTOYO, CILILITAN JAKARTA TIMUR

SUMBER: JUARA HARI/TGL: KAMIS HLM./KOL.: 11/ BID: 13
PEMBARUAN 7-4-2011 11-2
SUBJEK: SISMINBAKUM

Tuntaskan Perkara Sisminbakum

[JAKARTA] Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (Somak), mendesak Jaksa Agung Basrief Arief transparan dan berani melanjutkan perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada Departemen Hukum dan HAM ke pengadilan.

Menurut mereka, ada permainan dan intervensi politik pada kasus tersebut. Berkas perkara kasus ini sudah seharusnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan setelah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Tetapi, itu tidak dilakukan. Bahkan, ada indikasi penanganan perkara Sisminbakum akan dihentikan dengan berbagai alasan.

"Untuk itu, kami mendesak terus dan segera pengadilan koruptor Sisminbakum yang dianggap merugikan negara Rp 420 miliar. Kami juga menolak intervensi politik dan kekuasaan dalam pemberantasan korupsi, serta

menolak tekanan-tekanan kepada Jampidsus untuk

menghentikan kasus korupsi Sisminbakum dari pihak manapun," kata salah seorang mahasiswa saat berorasi di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (6/4).

Pengunjuk rasa mendesak supaya penanganan kasus Sisminbakum ini tidak dihentikan. Mereka juga mendesak menahan dan mengadili tersangka kasus tersebut, yakni Hartono Tanoesoedibjo dan Hary Tano-

esoedibjo. Keduanya dianggap sebagai dalang kasus Sisminbakum.

Mahasiswa juga menuntut aset yang diduga disembunyikan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) disita. "Kami minta Jaksa Agung tidak takut dan tidak ada permainan dengan pengusaha hitam yang telah menjarah uang negara 420 miliar," ujar salah satu peserta aksi.

Para mahasiswa yang bergabung dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta ini mendukung upaya Jampidsus Amari agar kasus itu tetap dilanjutkan ke penuntutan.

Kaji Mendalam

Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi Sisminbakum perlu pengkajian mendalam. "Kasus Sisminbakum perlu pengkajian mendalam, saya memohon untuk dukungannya," katanya.

Dalam kasus tersebut, sudah ditetapkan dua tersangka, yakni Yusril Ihza Mahendra (mantan Menteri Hukum dan HAM) dan Hartono Tanoesoedibjo (mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika/SRD).

Sampai sekarang penanganan kasus kedua tersangka itu masih tertahan dengan adanya penelitian atau pengkajian atas berkas mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Romli Atmasasmita yang bebas dari jeratan hukum melalui putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA). [N-8]